

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate governance saat ini merupakan kebutuhan vital bagi seluruh pelaku bisnis dan menjadi tuntutan bagi masyarakat dengan adanya *corporate governance* ini diharapkan ada regulasi serta aturan mengenai penerapan *corporate governance* yang sesuai, sehat dan baik bagi lingkungan bisnis di Indonesia. Perkembangan perspektif *corporate governance* berawal dari adanya *agency model* atau *agency theory*. *Agency theory* mengidentifikasi potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak (prinsipal dan agen) dalam perusahaan yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam berbagai cara yang berbeda (Sulistyanto dan Prapti, 2003). The Cadbury Committee (1992) dalam Husnan (2000) menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan menimbulkan *corporate governance* yang dinyatakan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Sistem *corporate governance* terdiri dari (1) berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah dan *stakeholders* yang lain; dan (2) berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak langsung menegakkan aturan tersebut atau disebut dengan mekanisme *corporate governance* internal dan eksternal.

Di Indonesia perkembangan *corporate governance* bermula pada tahun 1997, ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia. Berbagai akibat buruk dari krisis ekonomi tidak dapat dihindari, salah satunya ialah banyaknya perusahaan yang terpuruk dan tidak mampu bertahan dan lemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Iskander dan Chamlou (2000) dalam Hidayah (2008) menyampaikan krisis ekonomi yang terjadi di kawasan asia tenggara dan negara lain bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun lemahnya *Good Corporate Governance* di negara-negara tersebut sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi, yang efeknya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan tertinggi di Indonesia, menyadari kondisi dan situasi perekonomian menjadi sangat kacau dengan demikian, pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN memperkenalkan *Good Corporate Governance* di lingkungan BUMN. Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*

lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD (*Organization for Economic Corporation and Development*), yaitu *Transparency, accountability, responsibility, independence, fairness*. *Transparency*, dalam hal ini perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. *Accountability* berarti perusahaan mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan yang di kelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan akan mencapai kinerja yang berkesinambungan (Hidayah, 2008).

Menurut Black (2001) pengaruh praktik *corporate governance* terhadap nilai perusahaan akan lebih kuat dinegara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh bervariasinya praktik *corporate governance* di negara berkembang dibandingkan di negara maju. Lalu Klapper dan Love (2002) menyatakan bahwa *corporate governance* yang baik mempunyai hubungan yang tinggi dengan kinerja operasi dan penilaian pasar dalam Hidayah (2008).

Pada tahun ini keadaan perekonomian di Indonesia kembali mengalami perlemahan, Indonesia menjadi korban dari gejolak ekonomi karena

ketidakpastian suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat dan keputusan Tiongkok melemahkan mata uang atau devaluasi Yuan menjadi masalah bagi Indonesia. Fenomena super dolar AS menjadikan mata uang berbagai negara didunia ikut melemah drastis, dan rupiah terkena dampak dari meningkatnya nilai tukar dolar AS hal ini menjadi tidak mudah sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk menghadapinya. Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB 2000) dalam Hidayah (2008) menyimpulkan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, kondisi yang sering terjadi adalah (a) tidak berfungsinya mekanisme pengawasan dewan komisaris untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan (b) belum dilakukannya pengelolaan perusahaan secara profesional, yang kita ketahui sebagai negara berkembang Indonesia masih bergantung pada Investasi asing. Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya *supply* teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun teknologi permesinan, dan menciptakan lapangan kerja.

Perusahaan di Indonesia cenderung bergantung pada modal dari pihak eksternal atau investor untuk membiayai kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan perlu meyakinkan pihak penyandang dana eksternal bahwa investasi mereka digunakan secara tepat dan efisien. Manajemen juga memastikan bahwa manajemen bertindak (melakukan yang terbaik) untuk kepentingan perusahaan. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. *Corporate governance* merupakan pedoman bagi manajer untuk mengelola perusahaan secara *best practice*. Manajer akan membuat keputusan keuangan yang dapat menguntungkan semua pihak (*stakeholder*). Manajer bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal dan mampu meminimalkan risiko. Usaha tersebut diharapkan menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Investor akan memperoleh pendapatan (*return*) sesuai dengan harapan. Laba per saham meningkat sehingga saham perusahaan banyak diminati oleh investor. Menurut penelitian McKinsey dikutip oleh Luhukay (2002) Investor di negara maju bersedia memberi premium yang tinggi mencapai sekitar 28% kepada perusahaan yang menerapkan prinsip *corporate governance* dengan konsisten. Perusahaan tersebut menikmati valuasi pasar sampai dengan 10%-12%, sejalan dengan penelitian tersebut, survei yang dilakukan pada enam *emerging market* menunjukkan kaitan yang erat antara penerapan *corporate governance* dengan harga saham perusahaan-perusahaan publik tersebut

(Luhukay, 2002). Ini terjadi karena 75% investor dipasar menganggap keterbukaan dan informasi mengenai penerapan *corporate governance* sama pentingnya dengan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Penelitian ini akan meneliti pada sub sektor industri rokok di Indonesia, dapat dilihat dari perkembangan PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) yang mengumumkan pencapaian dan kinerja bisnisnya selama tahun 2014 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Paparan Publik Tahunan, menyoroti kinerja perusahaan serta komitmennya terhadap Indonesia melalui berbagai inisiatif untuk praktik yang berkelanjutan. *“2014 adalah tahun yang menantang, ditandai oleh kompetisi yang semakin ketat serta preferensi konsumen yang berubah dengan cepat, terutama dalam segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT). Sampoerna mengalami penurunan volume penjualan segmen SKT sebesar 22,9% pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. Meskipun dibandingkan dengan volume penjualan SKT Sampoerna yang sangat lemah pada kuartal pertama 2014, volume penjualan SKT pada kuartal pertama 2015 tetap menunjukkan tren penurunan sebesar 7,1% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun tahun sebelumnya. Namun, portofolio Sigaret Kretek Mesin (SKM) tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan dengan peningkatan volume sebesar 9% di tahun 2014.”* Di tahun 2014 Sampoerna mampu bertahan dari tekanan pasar dan ekonomi makro dengan mempertahankan posisi sebagai pemimpin dan menghasilkan volume penjualan tahunan sebesar 109,7 miliar batang dan pendapatan bersih sebesar Rp10,2 triliun. Sampoerna dan Philip Morris Indonesia juga mempertahankan peranannya sebagai salah satu kontributor pajak terbesar bagi Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2014, Sampoerna dan Philip Morris Indonesia membayar pajak dengan total lebih dari Rp52 triliun, yang terdiri dari cukai, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan perusahaan, dan pajak daerah. *"Penurunan*

yang berkelanjutan dalam segmen SKT, kenaikan pajak cukai, dan perubahan ketentuan pembayaran cukai akan menjadi tantangan tambahan di tahun 2015. Meskipun ada tekanan dari segi ekonomi makro serta lingkungan regulasi dan fiskal yang menantang bagi industri tembakau, Sampoerna tetap yakin pada kemampuan para karyawan berbakatnya dan portofolio merek yang terdepan."

Selama kuartal pertama tahun 2015, Sampoerna melaporkan kenaikan pendapatan dan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja yang lemah di kuartal pertama tahun 2014. Sampoerna menghasilkan penjualan bersih sebesar Rp21,6 triliun pada kuartal pertama tahun 2015, mengalami kenaikan sebesar 17,7% dari Rp18,3 triliun pada kuartal pertama tahun 2014. Laba bersih tumbuh menjadi Rp2,9 triliun dari Rp2,8 triliun pada periode yang sama di tahun 2014. Dalam RUPS, Sampoerna juga telah menyetujui pembagian dividen sebesar Rp4.273.425.000.000 atau Rp975 per lembar saham (www.sampoerna.com)

Dengan demikian, diharapkan dari pelaksanaan *corporate governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku membuat investor memberikan respon secara positif terhadap kinerja perusahaan dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan dan membantu investor serta pihak-pihak yang berkepentingan diperusahaan dalam mengambil keputusan terbaik dan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut peneliti ingin mengangkat topik tersebut sebagai topik skripsi dengan judul **“Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja**

Perusahaan Manufaktur Indonesia (Studi pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar di BEI) tahun 2005– 2014”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang timbul adalah:

1. Bagaimana pengaruh indikator mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia (Perusahaan Rokok yang terdaftar di BEI) tahun 2005-2014 secara simultan?
2. Bagaimana pengaruh indikator mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia (Perusahaan Rokok yang terdaftar di BEI) tahun 2005-2014 secara parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Terdapat pengaruh indikator mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia (Perusahaan Rokok yang terdaftar di BEI) tahun 2005-2014 secara simultan.
2. Terdapat pengaruh indikator mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia (Perusahaan Rokok yang terdaftar di BEI) tahun 2005-2014 secara parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

a) Akademisi

Penelitian ini untuk membantu peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Indikator mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Indonesia.

b) Investor dan Pihak-pihak berkepentingan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu serta membuat investor dan pihak-pihak berkepentingan mengambil keputusan terbaik dan tepat sasaran memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan.

c) Masyarakat

Sebagai referensi dan menambah wawasan mengenai kondisi dan situasi perekonomian di Indonesia dan memberikan peluang mengetahui kinerja perusahaan, sehingga masyarakat yang berminat untuk berinvestasi pada sebuah perusahaan dapat mengatur, menerapkan rencana strategis sebelum melakukan investasi.

d) Perusahaan

Penelitian ini dapat memperjelas kinerja perusahaan tersebut atau perusahaan yang dipimpin sehingga dapat mengatur strategi dan kebijakan yang di perlukan bagi perusahaan.